

## **INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA MELALUI PENGAJARAN BIPA**

**Ellis Reni Artyana**

*Selasar Bahasa*  
artyanaellis@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Peran bahasa Melayu sebagai lingua franca di wilayah Nusantara membuat para bangsa asing yang mendatangi kawasan ini pada abad ke-15 menyadari pentingnya mempelajari bahasa tersebut. Dalam perkembangannya saat ini, bahasa Indonesia yang mewarisi peran penting bahasa Melayu tersebut telah dipelajari di empat puluh lima negara. Hal ini tidak lepas dari langkah kongkret pemerintah untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang internasionalisasi bahasa Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia oleh Presiden dan Wakil Presiden di forum-forum resmi internasional. Secara politis, hal ini akan semakin meneguhkan eksistensi bahasa Indonesia di jagad global. Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia yang diramalkan akan semakin menguat juga turut menjadi motivasi para bangsa asing untuk mempelajari bahasa Indonesia di samping motivasi-motivasi lainnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi dan masa depan yang cerah untuk menjadi bahasa internasional. Lantas, bagaimana dengan pengajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) sejauh ini? Bagaimana perkembangannya serta apa saja tantangan yang dihadapi? Bagaimana pengajaran BIPA bisa menjadi gerbang utama bagi internasionalisasi bahasa Indonesia? Makalah ini akan membahas hal-hal terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.*

**Kata kunci:** *Internasionalisasi Bahasa Indonesia, Pengajaran BIPA*

### **A. Bahasa Indonesia di Jagad Global**

Pada tahun 1596, kakak beradik Fredrick de Houtman dan Cornelis de Houtman tiba di Banten setelah melakukan pelayaran selama 11 bulan atas perintah kongsi dagang Belanda. Selanjutnya, mereka kembali melakukan pelayaran dan akhirnya tiba di Aceh pada tahun 1599. Namun, hasutan yang dilakukan bangsa Portugis kepada Kesultanan Aceh tentang kedua kakak adik itu membuat Cornelis dihukum pancung dan Frederick harus dipenjara.

Sebelumnya, saat melakukan pelayaran dan singgah di sepanjang Ternate, Ambon, hingga ke Aceh, Frederick menemukan adanya kesamaan bahasa yang digunakan orang-orang di kawasan tersebut, yaitu bahasa Melayu. Frederick segera mengetahui bahwa bahasa Melayu ini digunakan sebagai *lingua franca* bagi orang-orang di kawasan Nusantara. Dari situ, dia bisa menyimpulkan bahwa apabila bangsa Belanda ingin menjalin hubungan dagang dengan orang-orang di Nusantara, maka sebaiknya mampu menggunakan bahasa Melayu untuk dapat berinteraksi dengan mereka. Maka, dibantu oleh Leonard Werner, seorang juru bahasa asal Luxemburg, Frederick mulai melakukan wawancara terhadap para tahanan lainnya untuk menuliskan kosakata-kosakata bahasa Melayu. Akhirnya, setelah Frederick bebas dari penjara, hasil wawancaranya disusun menjadi sebuah kamus berjudul *Spraek ende woordboek, inde Malaysche ende Madagaskarsche Talen met vele Arabische ende Turcsche Woorden* (“Konversasi dan kamus, dalam bahasa Melayu dan Madagaskar dengan daftar kosakata Arab dan Turki”). Selanjutnya, kamus ini menjadi buku yang wajib dipelajari oleh para nahkoda, saudagar, dan pejabat Kompeni yang akan ditugaskan di Nusantara.

Kesadaran bangsa Belanda terhadap peran penting bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan di Nusantara memunculkan kebutuhan untuk mempelajari bahasa tersebut. Karenanya, sejak saat itu, bahasa Melayu mulai dipelajari secara serius. Pada rentang tahun 1816 sampai dengan 1826, Gubernur Jenderal Va

der Cappellen membuat peraturan di Hindia Belanda tentang kewajiban para *ambtenar* Eropa untuk mempelajari dan menguasai bahasa Melayu. Bahkan pada 25 Maret 1819 secara tegas Gubernur membuat peraturan bahwa dalam waktu satu tahun para *ambtenar* tersebut harus mampu berbahasa Melayu sehingga tak lagi membutuhkan penerjemah saat menjalankan tugas. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal H.M. de Kock pada tahun 1826 s.d. 1830, dikeluarkan peraturan No. 16, 14 April 1826, bahwa semua *ambtenar* sipil dan militer wajib mempelajari buku tata bahasa Melayu dan kamus Melayu karya W. Marsden. Bahkan, dalam keputusan pemerintah No. 38, 22 November 1827, disebut bahwa naik tidaknya pangkat para *ambtenar* itu tergantung pada sejauh apa keterampilan mereka dalam berbahasa Melayu dan Jawa. Maka, seiring diterapkannya peraturan-peraturan tersebut, Bahasa Melayu juga mulai diajarkan di sekolah-sekolah saat itu, salah satunya di Sekolah Marine di Semarang, di samping juga mengajarkan bahasa Jawa, Belanda, Perancis, dan Inggris.

Sejak itu, bahasa Melayu memiliki posisi yang semakin penting di Hindia Belanda. Bahasa Melayu tidak lagi digunakan sebagai bahasa pergaulan di kalangan para pedagang, melainkan juga di situasi-situasi tutur yang lebih luas, termasuk dalam konteks situasi yang lebih formal, misalnya di sekolah dan lingkungan kantor. Meskipun Belanda menganggap bahasanya lebih unggul, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa bahasa Melayu lebih populer sehingga harus dipelajari demi kebutuhan komunikasi dengan masyarakat pribumi.

Pada 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda yang kedua telah meneguhkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Secara politik, bahasa Indonesia memiliki kedudukan paling tinggi sebagai bahasa pemersatu bangsa. Hal ini tentu berdampak pada semakin pesatnya perkembangan kajian-kajian tentang bahasa Indonesia, khususnya di luar negeri. Munculnya studi-studi mengenai bahasa Indonesia di banyak perguruan tinggi di luar negeri menjadi penanda bahwa bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu tersebut dipandang penting oleh bangsa asing.

Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri seperti di Jepang, bahasa Indonesia sudah mulai diajarkan di Tokyo University of Foreign Studies (Tokyo Gaikugo Daigaku) pada tahun 1922 dan menjadi bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris. Tiga tahun berselang, yaitu pada 1925, giliran Universitas Tenri yang mulai mengajarkan bahasa Indonesia. kemudian oleh Universitas Tenri yang mulai mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun 1925. Pada masa itu, tujuan pengajaran bahasa Indonesia di Jepang didasari oleh kebutuhan untuk memperluas wilayah jajahan Jepang di Indonesia.

Sejak awal, bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan, khususnya dalam interaksi antara kaum pedagang di wilayah Nusantara. Letak Indonesia yang berada pada titik persilangan antara Samudera Hindia dan Laut China Selatan membentuk batas antara dua wilayah yang berbeda secara geografi, antropologi, dan ekonomi. Tidak hanya sebagai wilayah transit bagi komoditi yang berasal dari wilayah barat dan wilayah timur, Nusantara juga merupakan wilayah berkumpulnya para pedagang yang datang dari berbagai arah. Kesadaran para pedagang yang datang dari luar kawasan Nusantara tentang pentingnya menjaga hubungan dagang dengan pribumi memunculkan kesadaran untuk mulai mempelajari bahasa Melayu. Hal ini berarti motivasi awal munculnya kesadaran berbahasa Melayu ini adalah motivasi ekonomi.

Situasi yang tak jauh berbeda terjadi pada saat ini. Indonesia yang dianggap memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat di dunia. Di kawasan Asia Tenggara, saat ini Indonesia menjadi negara dengan tingkat perekonomian tertinggi. Data dari Sekretariat ASEAN menyebutkan bahwa Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2017 mencapai US\$ 1,01 triliun. Hasil studi Oxford Economics menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang akan mendominasi perekonomian dunia dalam kurun waktu 10 mendatang. Hasil studi ini juga memprediksikan pertumbuhan PDB Indonesia yang akan naik sebesar 5,1 persen.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini serta prediksi tentang semakin baik kondisinya di masa yang akan datang secara tidak langsung menaikkan popularitas bahasa Indonesia di dunia. Perhatian seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, pada Indonesia pada akhirnya tidak sebatas terhadap aspek ekonominya saja, melainkan juga aspek budaya dan bahasa. Seperti halnya kesadaran bangsa Belanda terhadap pentingnya berbahasa Melayu pada masa awal kehadirannya di wilayah Nusantara, maka saat ini masyarakat di dunia memiliki kesadaran yang sama untuk memiliki kecakapan dalam berbahasa Indonesia. Selain itu, di samping daya tarik dalam bidang ekonomi tersebut, tentu aspek serta potensi- potensi lain yang dimiliki Indonesia turut menimbulkan motivasi kuat bangsa asing dalam mempelajari bahasa Indonesia, misalnya aspek budaya, pariwisata, dan lain sebagainya.

Semakin kuatnya potensi-potensi yang dimiliki Indonesia ini berbanding lurus dengan menguatnya posisi Indonesia di dalam pergaulan internasional. Segala hal yang berkenaan dengan Indonesia, termasuk bahasa Indonesia, semakin memiliki tempat khusus di tengah pergaulan tersebut. Dengan kata lain, menguatnya posisi Indonesia di dunia, baik dari segi aspek ekonomi maupun politik, turut memperkuat posisi bahasa Indonesia di jagad global.

## **B. Upaya Internasionalisasi Bahasa Indonesia**

Menguatnya posisi Indonesia di tengah pergaulan internasional menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat status dan posisi bahasa Indonesia di tengah masyarakat dunia. Bahasa Indonesia yang saat ini memiliki penutur jati tidak kurang dari 269 juta jiwa setidaknya menempatkannya sebagai bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Hal ini bisa menjadi modal bagi bahasa Indonesia untuk memperluas cakupan wilayah penggunaannya di kawasan ini dan menjadi bahasa pergaulan sebagaimana bahasa Melayu pada abad ke-16. Di lain pihak, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, posisi bahasa Indonesia semakin dipertimbangkan dalam ruang pergaulan yang lebih luas, yaitu di tengah bangsa-bangsa selain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadi semacam peluang atau pintu masuk bagi bahasa Indonesia agar lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat dunia. Untuk itulah, pemerintah Indonesia memiliki *political will* ihwal internasionalisasi bahasa Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan pondasi awal dalam mengupayakan hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.” Pernyataan tersebut menjadi titik awal komitmen pemerintah dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia di dunia. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu diupayakan pemerintah melalui lembaga kebahasaan pemerintah

serta diatur dalam peraturan pemerintah, sebagaimana isi ayat 2 dan 3 pasal tersebut.

Ihwal internasionalisasi bahasa Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Pasal 1 peraturan ini menyatakan “Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.” Jadi, selain menyebarkan bahasa Indonesia melalui pengajaran BIPA, di saat bersamaan pemerintah melakukan upaya-upaya untuk semakin memperkaya dan menguatkan bahasa Indonesia agar semakin siap menjadi bahasa internasional. Poin-poin lebih terperinci tentang internasionalisasi bahasa Indonesia terdapat dalam Pasal 31 peraturan tersebut. Di pasal itu disebutkan bahwa: (1) Peningkatan fungsi

Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa; (2) Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui: a) penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional; b) pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing; c) peningkatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri; d) pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri; dan/atau e) upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan menjalankan berbagai program, utamanya ihwal pengajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing). Secara umum, terdapat empat jenis pelayanan yang disediakan dalam mengembangkan BIPA, yaitu (1) pelayanan pengajaran BIPA, (2) pelayanan informasi ke- BIPA-an, (3) Pelayanan informasi kebahasaan, dan (4) pelayanan pengujian bahasa (UKBI). Penyusunan kurikulum, pengayaan buku-buku, serta pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mengajar bagi para pengajar BIPA dilakukan oleh PPSDK (Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan) yang merupakan lembaga di bawah Kemdikbud RI yang khusus membidangi bidang strategi diplomasi melalui bahasa. Selain itu, PPSDK sejak tahun 2015 memiliki program pengiriman tenaga pengajar BIPA ke berbagai negara. Program ini memungkinkan lembaga-lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri memperoleh bantuan tenaga pengajar dari Indonesia. Tidak hanya itu, program ini juga memungkinkan negara-negara yang belum memiliki satu pun penyelenggara program BIPA akhirnya bisa membuka kelas BIPA, sekurang-kurangnya di KBRI atau KJRI setempat, atau bahkan menjalin kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi di negara tersebut.

Untuk meneguhkan eksistensi bahasa Indonesia di pergaulan internasional, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Pasal 16 peraturan tersebut mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum resmi di luar negeri. Dengan begitu, jati diri bangsa Indonesia dapat terlihat melalui penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Hal itu juga dilakukan agar semakin banyak masyarakat dunia yang mengenal bahasa Indonesia.

Di ranah akademik, upaya internasionalisasi bahasa Indonesia ini juga dilakukan. Pada 6 November

2019, Musyawarah Internasional dan Seminar Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGB) ke-4 yang dihadiri oleh 154 peserta dari 31 delegasi Dewan Guru Besar dan para pakar/praktisi internasional menghasilkan sebuah deklarasi tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah internasional. Kesepakatan tersebut lahir dari beberapa pertimbangan tentang bahasa Indonesia, di antaranya (1) Bahasa Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai bahasa internasional karena sampai saat ini sudah diajarkan di 45 negara; (2) Memiliki kosakata lebih dari 100000 dan istilah keilmuan di pelbagai disiplin ilmu yang mencukupi, baik oleh jutaan orang di berbagai negara, terutama negara-negara ASEAN; (3) Jumlah penutur bahasa Indonesia lebih dari 267000000 orang dan bahasa Indonesia dipahami dengan baik oleh jutaan orang di berbagai negara, terutama negara- negara ASEAN; (4) Bahasa Indonesia diproyeksikan akan menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan perekonomian penting sehingga dipelajari di berbagai negara. Empat butir dalam deklarasi tersebut disepakati dan ditandatangani oleh ketua FDGB Indonesia, Prof. Mursalim, dan beberapa tokoh lainnya, yaitu Prof. Koentjoro (Dewan Pakar FDGBI), Ass. Prof. Siriporn Maneechukate (Thailand), Prof. Kamaruddin M. Said (Malaysia), Endina Asri Widartama BBA (Singapura), dan Prof. Setya Yuwana (Indonesia). Deklarasi ini semakin memperkuat status dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di bidang keilmuan, khususnya di ASEAN. Hal ini tentu menjadi nilai plus untuk semakin meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Semakin pesatnya perkembangan bidang pengajaran BIPA juga semakin memperdalam kajian tentang bidang ini. Secara kuantitas, jumlah pengajar BIPA saat ini bertambah lebih cepat daripada kurun waktu sepuluh tahun yang lalu. Dari segi kualitas, kompetensi para pengajar BIPA pun dapat dikatakan lebih baik. Hal ini mengingat sekarang ada banyak pelatihan-pelatihan pengajaran BIPA yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun beberapa perguruan tinggi. Meskipun demikian, peningkatan kompetensi pengajar BIPA harus semakin ditingkatkan. Peningkatan kualitas ini bisa difasilitasi melalui pelatihan- pelatihan dan dibukanya program studi khusus BIPA di perguruan-perguruan tinggi.

Selain itu, sejak November 1999 telah dibentuk APBIPA (Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing). Pembentukan asosiasi ini dilakukan usai penyelenggaraan Konferensi Internasional Pengajaran BIPA (KIPBIPA) ke-3 di IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia). Pada Desember 2015, APBIPA berubah menjadi APPBIPA (Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) demi mewadahi pengajar dan pegiat BIPA di dalam maupun di luar negeri. Saat ini kepengurusan APPBIPA terdiri atas kepengurusan di tingkat pusat, di daerah, dan di luar negeri. Di tingkat daerah, sudah terdapat dua belas cabang APPBIPA. Sementara itu, di luar negeri terdapat tiga cabang, yaitu APPBIPA Jerman, APPBIPA Thailand, dan APPBIPA Jepang. Afiliasi memiliki misi yaitu memartabatkan bahasa Indonesia dan memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada orang asing. Adanya afiliasi ini juga untuk menjadi ruang bertukar pikiran dan saling bersinergi dalam mengupayakan perkembangan bidang BIPA.

Sinergisitas antara berbagai pihak, baik para *stake holders*, akademisi, afiliasi, serta pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, akan semakin memuluskan jalan bahasa Indonesia untuk akhirnya bisa menjadi bahasa internasional.

### **C. Ihwal Pengajaran BIPA**

Pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing berbeda dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur jati. Perbedaan ini membuat pengajaran BIPA, sebagaimana pengajaran bahasa asing lainnya, memiliki karakteristik yang khas. Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing merupakan bahasa kedua bagi pemelajarnya. Karenanya, proses pemerolehan bahasanya berbeda dengan bahasa pertama mereka. Hal inilah yang membedakan pula pendekatan, metode, dan teknik pengajaran BIPA dengan bahasa Indonesia bagi penutur jati. Dengan kata lain, terdapat prinsip-prinsip tersendiri yang harus diperhatikan dalam proses pengajaran bahasa asing, termasuk BIPA.

Sebelum menilik prinsip-prinsip pengajaran BIPA, kita perhatikan terlebih dahulu prinsip-prinsip pengajaran bahasa yang dikemukakan oleh Rivers dalam Rahmina (2002: 8) berikut:

- a. bahasa adalah seperangkat kebiasaan;
- b. ajarkan berbahasa, bukan tentang bahasa;
- c. bahasa adalah apa yang dikatakan atau digunakan oleh penutur asli, bukan apa yang dipikirkan oleh seseorang untuk dikatakan; dan d. karakteristik bahasa yang satu dengan yang lain berbeda.

Bahasa adalah seperangkat kebiasaan yang karenanya dalam proses pembelajaran bahasa perlu dilakukan pengkondisian agar pemelajar terbiasa menggunakan bahasa target. Tubian merupakan teknik yang paling sering dilakukan di kelas bahasa asing agar pemelajar berkesempatan untuk terus melatih keterampilan berbahasa mereka. Perlu disadari juga oleh pengajar bahwa pengajaran bahasa asing bukanlah kegiatan mengajarkan bahasa melainkan mengajarkan keterampilan berbahasa. Selain itu, pemelajar perlu diberi pemahaman awal bahwa karakteristik setiap bahasa berbeda. Pemahaman ini diberikan agar pemelajar siap manakala menemukan sistem bahasa yang berbeda antara bahasa pertamanya dengan bahasa asing yang akan dipelajarinya.

Sama halnya dengan prinsip pengajaran bahasa asing pada umumnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran BIPA, yaitu (1) proporsi materi keterampilan dan nonketerampilan berbahasa; (2) pertimbangan lintas budaya pemelajar dan pengajar; (3) karakteristik pemelajar; (4) tujuan pemelajar belajar BIPA; (5) penentuan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan; (6) penentuan penggunaan media pembelajaran yang efektif; (7) penentuan penggunaan alat evaluasi pembelajaran yang tepat.

Materi keterampilan berbahasa adalah materi yang utama dalam pembelajaran BIPA. Keterampilan berbahasa ini meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Peningkatan kompetensi pemelajar tentang keempat keterampilan ini menjadi tujuan utama kegiatan pembelajaran BIPA. Akan tetapi, materi nonketerampilan berbahasa juga sangat diperlukan, salah satunya aspek budaya. Dalam hal pemberian materi tentang budaya, pengajar harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang budaya penutur jati bahasa target agar mampu memberikan pemahaman yang baik kepada pemelajar. Selain itu, karakteristik pemelajar juga perlu diperhatikan, baik yang berupa karakter pribadi atau yang dilatarbelakangi oleh budayanya. Pengajar juga harus mengetahui tujuan pemelajar mempelajari BIPA. Hal ini menentukan, salah satunya, bahan ajar seperti apa yang bisa diberikan. Pemelajar yang ingin belajar BIPA karena kelak akan

bekerja di Indonesia tentu berbeda dengan yang sekadar ingin berwisata dalam waktu singkat. Demikian juga dalam menentukan metode ajar yang tepat. Pemilihan media ajar juga perlu melihat sejauh apa media tersebut dapat menunjang dan mendukung keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran. Di penghujung kegiatan pembelajaran, perlu dilakukan kegiatan evaluasi untuk mengukur sejauh apa keterampilan berbahasa yang telah dimiliki oleh pemelajar. Untuk itu, perlu ditentukan alat evaluasi yang tepat dan benar-benar bisa mengukur tingkat keterampilan pemelajar tersebut.

Sementara itu, dalam mengukur tingkat keterampilan pemelajar, kita perlu mengetahui klasifikasi atau pembagian tingkat kemahiran berbahasa dari yang paling rendah hingga tinggi. Beberapa negara telah lama memiliki acuan tingkat kemahiran berbahasa asing, misalnya CEFR (Common European Framework of Reference) yang digunakan di seluruh negara Uni Eropa. Pada CEFR, pembagian tingkat kemahiran dimulai dari yang paling rendah, yaitu tingkat Basic User (A1, A2), Independent User (B1, B2), dan Proficient (C1, C2). Sementara itu, Amerika menggunakan ACTFL (American Council on the Teaching of the Foreign Languages) yang pembagiannya dimulai dari tingkat Novice (Low, Med, High), Intermediate (Low, Med, High), Advanced (Low, Med, High), dan Superior. Baik CEFR dan ACTFL banyak digunakan oleh negara-negara lain sebagai acuan tingkat kemahiran berbahasa. Untuk BIPA, awalnya tidak ada pengklasifikasian tingkat kemahiran sehingga beberapa lembaga penyelenggara menggunakan CEFR atau ACTFL sebagai acuan. Namun, sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah rampung menyusun dan mengesahkan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) BIPA. Pembagian tingkat kemahirannya adalah BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, BIPA 4, BIPA 5, BIPA 6, dan BIPA 7. Dengan adanya klasifikasi tingkat kemahiran ini, para penyelenggara program BIPA dan pemelajar memiliki acuan dalam menyusun kurikulum, silabus, bahan ajar, hingga perangkat evaluasi. Dikeluarkannya acuan standar oleh Kemdikbud ini menjadikan setiap lulusan BIPA di lembaga manapun memiliki standar kompetensi yang sama.

Pengajaran BIPA menitikberatkan pada empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mahir berbahasa berarti menguasai keempat keterampilan tersebut. Oleh karena itu, tujuan pengajaran BIPA adalah mengupayakan agar siswa memiliki keterampilan-keterampilan tersebut. Pengajar dituntut mampu menyiapkan dan menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang dapat meningkatkan keempat keterampilan tersebut. Agar tercapainya tujuan pengajaran BIPA, keempat keterampilan tersebut harus diajarkan secara efektif dan terintegrasi. Meningkatkan keterampilan berbahasa pemelajar membutuhkan proses yang bertahap. Pengajar harus bisa membuat pemelajar menemukan tantangan selama proses tersebut agar keterampilannya semakin terasah.

#### **D. Aspek Budaya dalam Pengajaran BIPA**

Dalam sebuah bahasa, terdapat nilai-nilai budaya penuturnya. Nilai-nilai tersebut salah satunya tercermin dalam tindak tuturnya. Karenanya, seseorang yang berbahasa asing sepatutnya menyadari nilai-nilai bahasa yang terkandung dalam bahasa tersebut. Apabila dia mampu memahami budaya dalam bahasa tersebut, maka proses komunikasi dirinya dengan si penutur jati akan berlangsung secara efektif.

Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mempelajari suatu bahasa harus bersamaan dengan mempelajari budayanya. Di samping itu, pemelajar juga harus memiliki kompetensi antarbudaya atau

kesadaran untuk menemukan konsep maupun nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lain. Dengan kata lain, pemelajar harus memiliki kesadaran budaya. Aspek budaya dalam pengajaran bahasa menjadi hal yang krusial dan wajib dihadirkan. Kompetensi antarbudaya itu sendiri meliputi pengetahuan tentang sejarah, agama dan kepercayaan, tata krama, dan lain sebagainya. Dalam tindak tutur, budaya tercermin dalam ekspresi-ekspresi seperti saat menyampaikan selamat, berduka cita, memberikan pujian, menyatakan pendapat, meminta tolong, menolak tawaran, dan lain-lain. Aspek-aspek budaya tersebut harus diajarkan bersamaan dengan proses pembelajaran keterampilan berbahasa.

Dalam konteks Indonesia, pengajaran budaya jauh lebih kompleks mengingat ada beragam budaya yang dimiliki Indonesia yang sukunya berbeda-beda. Kita memang tidak bisa mengeneralisasi budaya di Indonesia untuk dapat diajarkan kepada pemelajar BIPA. Kita juga tidak bisa hanya mengambil salah satu suku sebagai representasi budaya seluruh masyarakat Indonesia. Di lain pihak, mengajarkan budaya seluruh suku di Indonesia pasti memakan waktu terlalu panjang. Oleh karena itu, budaya yang dikenalkan bisa dimulai dulu dengan hal-hal terkait budaya Indonesia yang bersifat umum, contohnya tidak memanggil orang yang lebih tua dengan hanya memanggil nama. Di Indonesia, aturan ini ada di seluruh tempat sehingga hal itu bisa diajarkan dengan mengatakan bahwa itu budaya Indonesia.

Mengingat pentingnya pengajaran budaya dalam pengajaran BIPA, maka sudah dipastikan bahwa kompetensi budaya adalah hal yang mutlak dimiliki oleh para pengajarnya. Selain harus betul-betul memahami budaya Indonesia, pengajar setidaknya juga perlu tahu latar belakang budaya pemelajarnya. Hal ini agar pengajar dapat menemukan di aspek-aspek mana saja terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara budaya Indonesia dengan budaya pemelajar. Sensitifitas ini perlu dimiliki para pengajar BIPA agar bisa mengetahui cara berpikir pemelajar yang artinya bisa mengira-ngira cara pandang mereka ketika mengetahui konsep budaya Indonesia. Selain itu, kompetensi ini juga tentunya penting agar pengajar mampu mengajarkan budaya kepada para pemelajar BIPA.

#### **E. Peluang dan Tantangan**

Terutama sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang upaya internasionaliasi bahasa Indonesia, bidang pengajaran BIPA semakin berkembang. Dampak dari hal tersebut, saat ini ada semakin banyak lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal yang menjalankan program BIPA. Bahkan saat ini sudah mulai banyak dari lembaga tersebut yang membuka kelas BIPA daring. Dengan banyaknya pihak yang membuka kelas BIPA, maka jumlah lulusan program BIPA juga semakin bertambah.

Di samping itu, kerja sama di bidang BIPA antara universitas di Indonesia dengan universitas di luar negeri semakin banyak dilakukan. Demikian pula dengan kerja sama antara pemerintah dengan pihak pemerintah di luar negeri atau dengan lembaga penyelenggara BIPA. Hal ini memungkinkan semakin luasnya kemungkinan bertambahnya lembaga penyelenggara BIPA, khususnya di luar negeri.

Saat ini, setidaknya tercatat ada sebanyak 45 lembaga penyelenggara BIPA di dalam negeri. Di luar negeri, saat ini ada sekitar 130 lembaga penyelenggara BIPA yang diketahui keberadaannya. Lembaga-lembaga BIPA itu tersebar di 45 negara. Bermunculannya lembaga-lembaga penyelenggara BIPA ini menjadi angin segar bagi masa depan bahasa Indonesia di jagad global. Pengajaran BIPA bisa kita ramalkan



akan semakin berkembang yang tentu akan memberikan imbas positif terhadap fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Potensi-potensi yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik bagi orang asing mempelajari bahasa Indonesia. Beberapa potensi itu di antaranya adalah potensi di bidang budaya, pariwisata, dan pendidikan. Bukan hal yang baru bila kita mengetahui bahwa salah satu daya tarik Indonesia di mata dunia adalah keberagaman budayanya. Selain menjadi daya tarik bagi para wisatawan, keberagaman budaya masyarakat Indonesia juga menjadi objek penelitian yang menarik. Seni dan tradisi yang dimiliki masyarakat Indonesia begitu kaya sehingga ada banyak aspek yang bisa diteliti oleh orang asing dari berbagai latar belakang keilmuan. Jika para peneliti tersebut mampu berbahasa Indonesia, tentu akan mempermudah proses penelitian mereka. Maka, hal ini pulalah yang bisa menjadi peluang bagi bahasa Indonesia untuk lebih banyak digunakan orang asing dalam ruang lingkup bidang keilmuan.

Selain itu, fakta bahwa kondisi Indonesia mengalami peningkatan di bidang ekonomi juga menjadi pintu peluang yang lebar bagi perkembangan BIPA. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi ini menjadi daya tarik bagi para bangsa asing sehingga berkeinginan melakukan hubungan bisnis dengan orang Indonesia. Interaksi keduanya memunculkan kebutuhan para bangsa asing tersebut untuk mampu berbahasa Indonesia. Dengan demikian, jumlah penutur asing yang berbahasa Indonesia semakin bertambah. Semakin banyak jumlah penutur asing yang berbahasa Indonesia, maka semakin kuat status bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di dunia.

Harus kita sadari bahwa saat ini jumlah orang asing yang tertarik belajar bahasa Indonesia atas dasar motif ekonomi atau dengan tujuan untuk berbisnis di Indonesia lebih banyak daripada motif lainnya, misalnya karena menyukai budaya Indonesia, memang tertarik dengan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Tentu tidak ada yang salah dengan motivasi ini. Bagaimana pun bahasa Indonesia, sebagaimana bahasa itu sendiri, adalah alat komunikasi yang karenanya dapat digunakan untuk kepentingan apa pun termasuk bekerja, menjalin bisnis, atau membuka usaha. Namun, apabila bahasa Indonesia dipelajari hanya sebatas alasan yang bersifat pragmatis, tanpa diimbangi dengan pemahaman budaya penutur jatinya, maka bahasa Indonesia hanya akan dipandang sebagai alat saja, bukan sebagai sebuah identitas bangsa yang memiliki jati diri sehingga harus dihormati oleh si pelajar. Hal ini tentu melenceng dari tujuan awal internasionalisasi bahasa Indonesia, yaitu untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam PP Nomor 57 Tahun 2014.

Demikian pula dalam pengajarannya. Seorang pengajar BIPA harus memiliki paradigma yang sesuai dengan isi peraturan pemerintah tersebut ihwal tujuan internasionalisasi bahasa Indonesia. Pengajar BIPA sepatutnya mampu mengupayakan proses pembelajaran BIPA yang tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan berbahasa saja, tetapi juga memasukkan materi-materi yang berkenaan dengan budaya Indonesia agar dapat dipahami oleh pembelajarnya. Secara berkesinambungan, pembelajar juga perlu dibimbing untuk melihat bahasa Indonesia dari perspektif yang lebih luas, yaitu bukan hanya sebatas alat komunikasi melainkan juga sebagai sebuah identitas sebuah bangsa. Dengan begitu, pembelajar dapat menghormati bahasa, budaya, dan bangsa Indonesia. Dengan begitu pula, cita-cita negara ini dalam

menempatkan bahasa Indonesia di posisi yang tinggi di tengah pergaulan antarbangsa dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana agar situasi sosial dan politik Indonesia selalu stabil agar mampu menciptakan citra yang positif di mata dunia. Situasi politik yang bergejolak ditambah kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia kerap menjadi hal yang disorot oleh dunia. Isu-isu lainnya seperti pelanggaran HAM, intoleransi, aksi terorisme, hingga isu-isu perusakan lingkungan juga menjadi persoalan besar yang sangat mendapat perhatian masyarakat internasional. Isu-isu tersebut tentu memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Berita mengenai demonstrasi yang anarkis hingga aksi terorisme tentu menimbulkan rasa tidak aman bagi pemelajar yang sedang tinggal dan belajar di Indonesia. Isu lingkungan atau pelanggaran HAM mungkin tidak terlalu mengancam keselamatan pemelajar, apalagi yang tidak tinggal di Indonesia, tetapi akan membuat pandangan mereka terhadap Indonesia menjadi negatif. Hal ini tentu akan menurunkan minat orang asing terhadap bahasa Indonesia. Karenanya, pemerintah sangat perlu memerhatikan hal-hal ini. Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia perlu bersinergi untuk menciptakan iklim yang positif demi menjaga dan meningkatkan minat orang asing terhadap bahasa dan budaya Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Bahasa Indonesia mewarisi peran sebagai *lingua franca* dari bahasa Melayu sebagai akarnya. Sejak abad ke-16 hingga Kongres Pemuda ke-2 tahun 1928, popularitas bahasa Melayu yang kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia semakin meningkat. Bahasa Indonesia mulai dipelajari oleh bangsa asing karena dianggap dapat menjembatani hubungan antara mereka dengan pribumi. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing hingga saat ini tidak bisa lepas dari sejarah tersebut.

Sejak ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, penyebaran bahasa Indonesia mulai dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Tujuan internasionalisasi bahasa Indonesia ini sangat semakin diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Pengembangan dilakukan melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, serta pengembangan laras bahasa.

Pengajaran BIPA adalah pintu utama internasionalisasi bahasa Indonesia. Pengajaran BIPA meliputi empat keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, menulis) ditambah dengan aspek budaya. Aspek budaya menjadi hal yang sangat penting agar pemelajar BIPA tidak hanya mampu berbahasa Indonesia, melainkan juga dapat mengenal budayanya sehingga diharapkan mampu menghargai dan menghormati negara dan bangsa Indonesia. Rujukan penyelenggara BIPA dalam hal tingkatan kemahiran berbahasa mengacu pada SKL (Standar Kompetensi Lulusan) BIPA yang dikeluarkan oleh Kemdikbud.

Program pembelajaran BIPA yang semakin banyak dilakukan di dalam maupun luar negeri menjadi indikasi bahwa upaya internasionalisasi bahasa Indonesia berjalan lancar. Potensi ekonomi Indonesia yang semakin meningkat, keberagaman budaya Indonesia, serta potensi wisata di tanah air menjadi tiga daya tarik utama Indonesia di mata orang asing sehingga bisa menjadi motivasi untuk mempelajari bahasa Indonesia.

Namun, minat tersebut bisa luntur apabila kita tidak bisa menjaga stabilitas negara, khususnya dari aspek sosial dan politik. Isu-isu lingkungan, tindakan korupsi, pelanggaran HAM, intoleransi, hingga aksi terorisme merupakan persoalan yang harus kita atasi bersama agar citra Indonesia selalu baik di mata dunia sehingga bisa terus meningkatkan minat orang asing untuk mempelajari Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Appbipa.or.id. *Sejarah APPBIPA*. Diakses pada 19 November 2019 dari <http://appbipa.or.id/badanbahasa.kemdikbud.go.id>. *Internasionalisasi Bahasa Indonesia*. Diakses pada 19 November 2019 dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2988/internasionalisasi-bahasa-indonesia>
- Broughton, Geoffrey, Christopher Brumfit, Roger Flaffel (ed). (1980) *Teaching English as a Foreign Language*. London and New York: Routledge.
- Byram, M. 1997. *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
- Byram, M. 2008. *From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship: Essays and Reflections*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Flaherty, B. E. dan Stojakovic, J. 2008. "Intercultural Competence as a Key Element toward Cultural Integration of International Students in the United States" Paper presented at the Annual Meeting of the NCA 94th Annual Convention, TBA, San Diego, CA, 20-11-2008. Accessed 25-4-2009 from [http://www.allacademic.com/meta/p258719\\_index.html](http://www.allacademic.com/meta/p258719_index.html).
- Galloway, V. (1998). Constructing cultural realities: "Facts" and frameworks of association. In J. Harper, M. Lively, dan M. Williams (Eds.), *The Coming of Age of the Profession: Emerging Issues in the Teaching of Foreign Languages* (pp. 129-140). Boston: Heinle and Heinle.
- Lado, R. 1963. *Linguistics Across Cultures*. The University of Michigan Press.
- May, F.B. 1996. *Reading as Communication: An Interactive Approach*. London: Merrill Publishing Company.
- Nunan, D. 1991. *Language Teaching Methodology*. USA: Prentice Hall International Ltd.
- Rahmina, Iim. 2002. "Strategi Belajar Mengajar BIPA". Bandung: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- Rivers, W.M. 1993. *Interactive Language Teaching*. USA: Cambridge University Press.
- Rivers, W.M. 1981. "Teaching-Foreign Language Skills", The University of Chicago Press: Chicago.
- Suratminto, Lilie. 2011. *Strategi Perdagangan dengan Pendekatan Linguistik Frederick de Houtman sebagai Model untuk Menguasai Nusantara oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda*. Diakses pada 20 November 2019, dari [https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/1819072011\\_19.pdf](https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/1819072011_19.pdf)
- Syaifera, Aisyah. 2016. *Perdagangan di Nusantara Abad ke-16*. Diakses pada 20 November 2019 dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/15820>